

ABSTRAK

MODEL PENENTUAN PRIORITAS PENGELOLAAN ASET BERBASIS e-PAKSI DI DAERAH IRIGASI WAY SEKAMPUNG

Oleh

RESTIKA PUTRI

Masalah yang dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan pada Daerah Irigasi Way Sekampung adalah luas fungsional yang mencapai 55.373 Ha dengan tujuh (7) sub daerah irigasi, sedangkan dana rehabilitasi yang tersedia belum tentu mencukupi untuk seluruh sub daerah irigasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian kinerja dan penentuan prioritas penanganan aset yang dalam hal ini digunakan 2 metode dengan parameter yang berbeda, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 serta menggunakan metode AHP (*Analytic Hierarchy Process*). Dari hasil studi ini didapatkan nilai IKSI adalah sebesar 71,27% dari 100 % dengan kategori kinerja baik. Berdasarkan hasil analisis skala prioritas pengelolaan aset pada 7 (tujuh) sub Daerah Irigasi Way Sekampung berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 dan metode AHP (*Analytic Hierarchy Process*) menunjukkan hasil yang berbeda. Hasil pada metode permen PUPR No. 12/PRT/M/2015 menunjukkan semakin tinggi jumlah kerusakan semakin menjadi prioritas, padahal ada tingkat kepentingan (hierarki antar aset) yang harus diperhatikan. Sedangkan pada metode AHP parameter yang digunakan adalah pendapat para ahli dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan aset, giliran rehabilitasi antar daerah irigasi, ketahanan aset bertahan, pengaruh penundaan usulan pekerjaan pada produksi padi dan kemampuan keuangan guna membiayai usulan pekerjaan.

Kata kunci: Skala Prioritas, Kinerja Irigasi, e-PAKSI

ABSTRACT

ASSET BASED PRIORITY DETERMINATION MODEL E-PAKSI IN THE WAY SEKAMPUNG IRRIGATION AREA

By

RESTIKA PUTRI

The problem faced by the government in carrying out operations and maintenance activities in the Way Sekampung Irrigation Area is that the functional area reaches 55.373 Ha with seven sub-irrigation areas, while the available rehabilitation funds are not necessarily sufficient for all sub-irrigation areas. Therefore, it is necessary to evaluate performance and determine priorities for handling assets, in this case using 2 methods with different parameters, namely based on the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 12/PRT/M/2015 and using the AHP (Analytic Hierarchy Process) method. From the results of this study, it was found that the IKSI score was 71.27% of 100% in the good performance category. Based on the results of an analysis of the priority scale of asset management in seven Way Sekampung Irrigation Areas based on the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 12/PRT/M/2015 and the AHP (Analytic Hierarchy Process) method shows different results. The results on the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 12/PRT/M/2015 method shows that the higher the amount of damage, the more it becomes a priority, even though there is a level of importance (hierarchy between assets) that must be considered. Meanwhile, in the AHP method, the parameters used are expert opinions taking into account the level of importance of assets, rehabilitation shifts between irrigation areas, asset resilience, the effect of postponing work proposals on rice production and financial capacity to finance proposed work.

Keywords: Priority Scale, Irrigation Performance, e-PAKSI